Kementerian Keuangan
Direktorat Jenderal Pajak

amnesti pajak

ungkap . tebus . lega

LATAR BELAKANG

- MODERASI PERTUMBUHAN EKONOMI GLOBAL
- PEREKONOMIAN AMERIKA YANG BELUM STABIL
- PERLAMBATAN PERTUMBUHAN TIONGKOK
- KETIDAKPASTIAN KEBIJAKAN MONETER
- HARGA KOMODITAS MENURUN
- RISIKO GEOPOLITIK: TIMUR TENGAH & BREXIT

DAMPAK BAGI INDONESIA

- PERLAMBATAN EKONOMI INDONESIA
- DEFISIT NERACA PERDAGANGAN
- DEFISIT ANGGARAN MEMBESAR
- PENURUNAN LAJU PERTUMBUHAN SEKTOR INDUSTRI/ MANUFAKTUR
- *INFRASTRUCTURE GAP* YANG MASIH TINGGI

AKIBAT KONDISI TERSEBUT

PENGANGGURAN

KEMISKINAN

KESENJANGAN

MAKIN

MENINGKAT

KITA HARUS

TEMUKAN!

SUMBER

PERTUMBUHAN

EKONOMI

BARU!

amnesti pajak

PERTUMBUHAN EKONOMI MENURUN

Indonesia mencari sumber investasi dari **LUAR NEGERI**

Peluang **INVESTASI** di Indonesia **TERBUKA LEBAR**

KITA HARUS

TEMUKAN!

DENGAN
CARA
REPATRIASI

amnesti
pajak

HARTA WNI TERSEBAR DI SELURUH DUNIA

amnesti pajak

HARTA WNI TERSEBAR DI SELURUH DUNIA

WAKTUNYA UNTUK KEMBALI, SEKARANG!

amnesti pajak

MENGAPA SEKARANG?

"Negara ini **membutuhkan banyak** dana untuk pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif"

amnesti pajak

MENGAPA SEKARANG?

MANFAATKAN PENGAMPUNAN PAJAK SEKARANG, SEBELUM:

AUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATION (AEOI)

PALING LAMBAT MULAI 2018

REVISI UU PERBANKAN UNTUK KETERBUKAAN DATA BAGI PERPAJAKAN

WP <u>tidak akan</u> bisa lagi menyembunyikan asetnya (di mana pun) dari otoritas pajak

MAKSUD
TUJUAN
AMNESTI PAJAK

SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI MELALUI REPATRIASI ASET

Yang bertujuan

- Peningkatan likuiditas domestik;
- Perbaikan nilai tukar Rupiah;
- Suku Bunga yang kompetitif;
- Peningkatan **INVESTASI**

MAKSUD
TUJUAN
AMNESTI PAJAK

PERLUASAN BASIS DATA PERPAJAKAN

- Data lebih valid, komprehensif dan terintegrasi
- Perhitungan potensi penerimaan pajak lebih *reliable*

MAKSUD
TUJUAN
AMNESTI PAJAK

MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK

JANGKA PENDEK

Penerimaan dari uang tebusan

JANGKA PANJANG

Penerimaan pajak berdasarkan basis data yang lebih lengkap dan akurat

DEFINISI

AMNESTI PAJAK

“**penghapusan pajak** yang seharusnya terutang, **tidak dikenai sanksi** administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar *Uang Tebusan*.

6 KEUNTUNGAN AMNESTI PAJAK

1 PENGHAPUSAN

PAJAK YANG SEHARUSNYA TERUTANG

2 TIDAK DIKENAI

SANKSI ADMINISTRASI DAN SANKSI PIDANA PERPAJAKAN

3 TIDAK DILAKUKAN

PEMERIKSAAN, PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN, & PENYIDIKAN

4 PENGHENTIAN

PROSES PEMERIKSAAN, PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN, ATAU PENYIDIKAN

5 JAMINAN RAHASIA

DATA PENGAMPUNAN PAJAK TIDAK DAPAT DIJADIKAN DASAR PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA APA PUN

6 PEMBEBASAN

PAJAK PENGHASILAN UNTUK BALIK NAMA HARTA TAMBAHAN

amnesti pajak

BERLAKU UNTUK

PPh

PPN/PPnBM

Sampai dengan **AKHIR TAHUN PAJAK TERAKHIR***

*** TAHUN PAJAK TERAKHIR**

Tahun Pajak yang berakhir pada jangka waktu 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015

“Setiap orang/badan **berhak** mendapatkan Amnesti Pajak”

BADAN

ORANG PRIBADI (OP)

PENGUSAHA OMZET TERTENTU

OP/BADAN **BELUM** BER-NPWP

PENGECUALIAN SUBJEK

Wajib Pajak yang sedang:

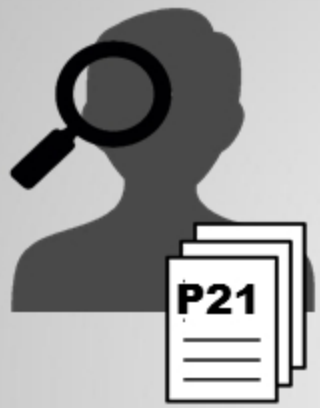

dilakukan **penyidikan** & berkas penyidikannya telah dinyatakan **lengkap** oleh Kejaksaan

dalam proses **peradilan**

menjalani hukuman pidana

...atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan!

CARA: 1.UNGKAP

UNGKAPKAN
SELURUH HARTA
YANG
BELUM DILAPORKAN
PADA SPT TAHUNAN PPh

amnesti
pajak

CARA: 2.TEBUS

CARA HITUNG UANG TEBUSAN

TARIF X HARTA BERSIH

amnesti pajak

CARA HITUNG HARTA BERSIH

HARTA TAMBAHAN

DIKURANGI

UTANG

UTANG TERKAIT PEROLEHAN HARTA TAMBAHAN

dan belum dilaporkan di SPT PPh terakhir

HARTA BERSIH

CARA HITUNG HARTA BERSIH

HARTA BERUPA KAS DILAPORKAN SESUAI NILAI NOMINAL

HARTA SELAIN KAS DILAPORKAN SESUAI HARGA WAJAR MENURUT PERHITUNGAN WAJIB PAJAK SENDIRI

RP

JIKA DALAM MATA UANG ASING, HARUS DIRUPIAHKAN DENGAN KURS MENTERI KEUANGAN PADA AKHIR TAHUN PAJAK TERAKHIR

CARA HITUNG HARTA BERSIH

UTANG TERKAIT PEROLEHAN HARTA
DAPAT DIKURANGKAN PALING BANYAK:

75% DARI HARTA TAMBAHAN
UNTUK WP BADAN

50% DARI HARTA TAMBAHAN
UNTUK WP ORANG PRIBADI

NILAI WAJAR

Adalah nilai yang menggambarkan kondisi dan keadaan aset yang sejenis atau setara **BERDASARKAN PENILAIAN** Wajib Pajak

Dicatat sebagai harga perolehan harta yang dilaporkan **PALING LAMBAT** pada **SPT TAHUNAN PPh 2017**

PENGUNGKAPAN HARTA YANG BERADA **DI DALAM** WILAYAH NKRI

TARIF

2%

PERIODE I

SEJAK UU BERLAKU S.D. AKHIR BULAN KE-3

3%

PERIODE II

BULAN KE-4 UU BERLAKU S.D. 31 DESEMBER 2016

5%

PERIODE III

1 JANUARI 2017 SAMPAI 31 MARET 2017

PENGUNGKAPAN HARTA YANG BERADA **DI LUAR** WILAYAH NKRI

TARIF

4%

PERIODE I

SEJAK UU BERLAKU S.D. AKHIR BULAN KE-3

6%

PERIODE II

BULAN KE-4 UU BERLAKU SAMPAI 31 DESEMBER 2016

10%

PERIODE III

1 JANUARI 2017 SAMPAI 31 MARET 2017

JIKA HARTA TERSEBUT **TIDAK DIALIHKAN** KE DALAM NEGERI

JIKA ANDA **ALIHKAN** & **INVESTASIKAN** HARTA DI LUAR NEGERI KE DALAM WILAYAH NKRI

amnesti pajak

TARIF SPESIAL

Untuk WP yang mengalihkan dan menginvestasikan harta di **luar negeri** ke dalam **Wilayah NKRI**

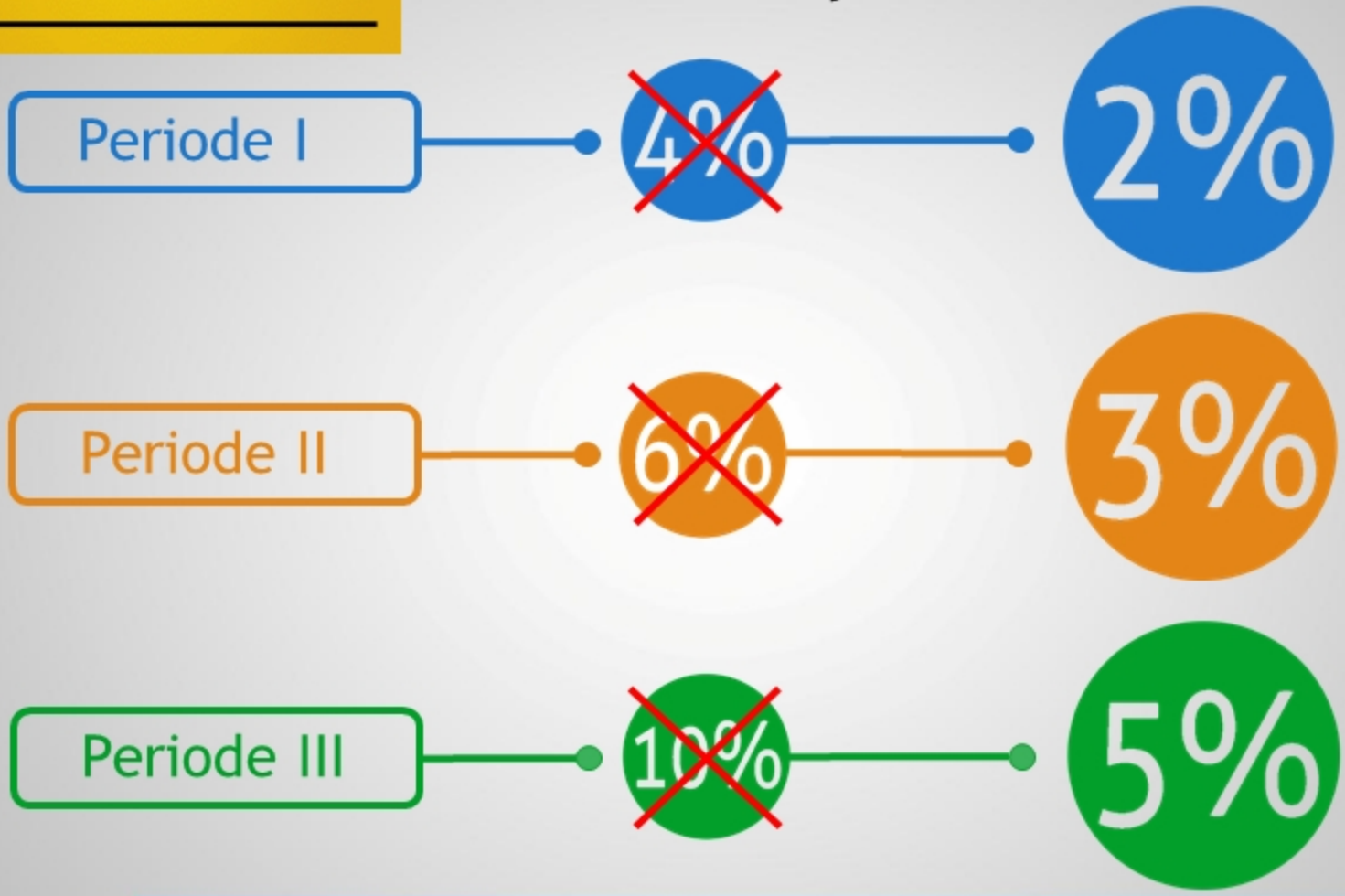

BATAS WAKTU PENGALIHAN HARTA MASUK KE WILAYAH NKRI

PENYAMPAIAN SURAT PERNYATAAN

SEJAK UU BERLAKU S.D. AKHIR BULAN KE-3

PENYAMPAIAN SURAT PERNYATAAN

BULAN KE-4 UU BERLAKU S.D. 31 DESEMBER 2016

PENYAMPAIAN SURAT PERNYATAAN

1 JANUARI 2017 SAMPAI 31 MARET 2017

SARANA INVESTASI

- Surat berharga Negara Republik Indonesia
- Obligasi BUMN;
- Obligasi lembaga pembiayaan milik Pemerintah;
- Investasi keuangan pada Bank Persepsi;
- Obligasi perusahaan swasta yang diawasi OJK;
- Investasi infrastruktur melalui kerja sama Pemerintah dengan badan usaha;
- Investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh Pemerintah;
- Bentuk investasi lainnya yang sah sesuai UU.

Jangka Investasi
PALING SINGKAT
3 TAHUN
di Indonesia

TARIF KHUSUS

PELAKU USAHA

OMZET

SAMPAI RP4,8M

amnesti pajak

TARIF KHUSUS OMZET TERTENTU

WAJIB PAJAK DENGAN PEREDARAN USAHA S.D. Rp4,8MILIAR PADA TAHUN PAJAK TERAKHIR

0,5%

JIKA HARTA YANG DIUNGKAPKAN **SAMPAI DENGAN** Rp10 MILIAR

2%

JIKA HARTA YANG DIUNGKAPKAN **LEBIH DARI** Rp10 MILIAR

SEJAK UU BERLAKU S.D. 31 MARET 2017

amnesti pajak

3 TAHUN

JANGKA WAKTU MINIMAL HARTA TAMBAHAN YANG DIUNGKAPKAN ATAU DIALIHKAN MASUK KE WILAYAH NKRI UNTUK **TETAP BERADA** DI WILAYAH NKRI

amnesti pajak

CARA PERMOHONAN

Temui HELPDESK untuk informasi:

- Seputar Pengampunan Pajak
- Persyaratan yang diperlukan
- **TUNGGAKAN PAJAK**
- Penghitungan uang tebusan

Bayar Uang Tebusan

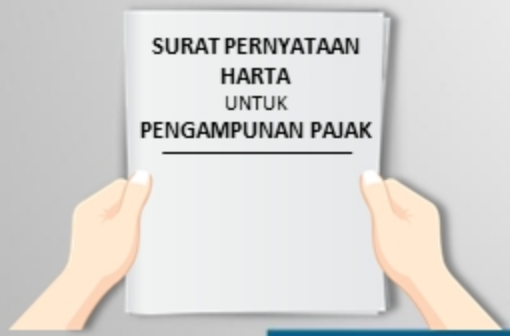

Sampaikan Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak beserta lampirannya

TUNGGAKAN PAJAK

1. **JUMLAH POKOK** pajak yang belum dilunasi

2. **TAMBAHAN PAJAK** yang masih harus dibayar termasuk **PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK DIKEMBALIKAN**
(berdasarkan keputusan DJP atau putusan peradilan)

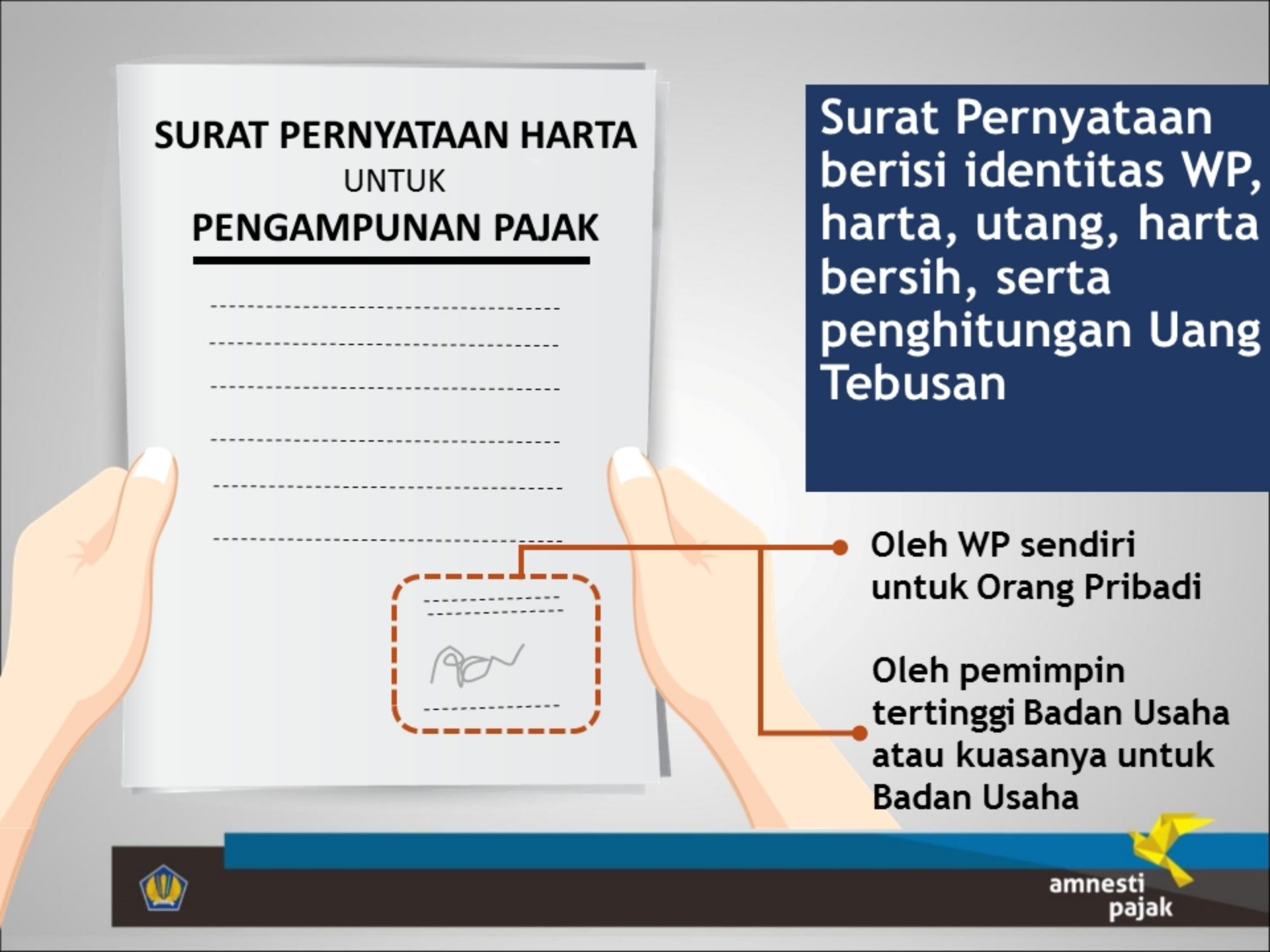

Surat Pernyataan berisi identitas WP, harta, utang, harta bersih, serta penghitungan Uang Tebusan

Oleh WP sendiri untuk Orang Pribadi

Oleh pemimpin tertinggi Badan Usaha atau kuasanya untuk Badan Usaha

amnesti pajak

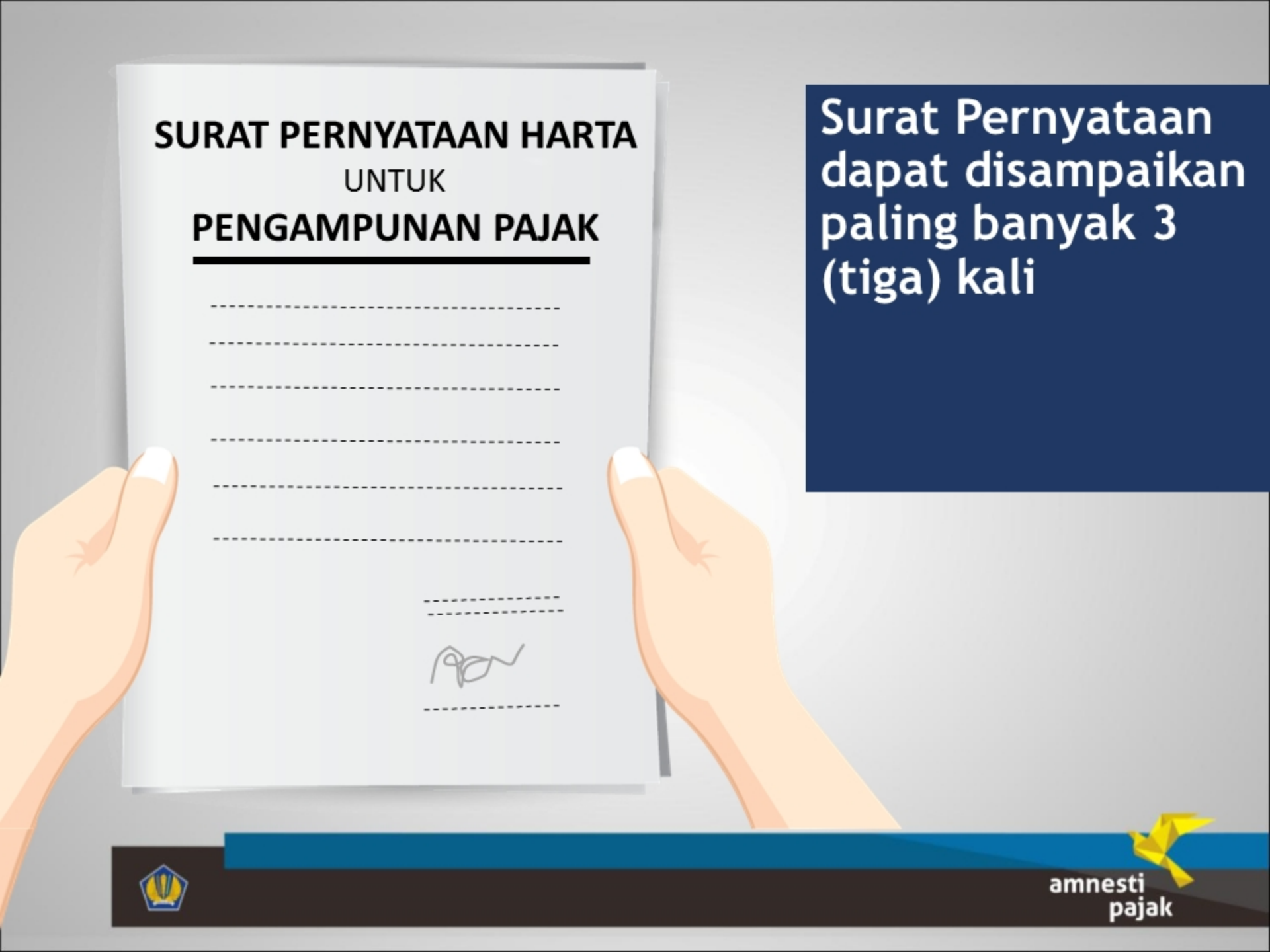
SURAT PERNYATAAN HARTA
UNTUK
PENGAMPUNAN PAJAK
Surat Pernyataan dapat disampaikan paling banyak 3 (tiga) kali
amnesti pajak

PERSYARATAN

MEMILIKI NPWP

MEMBAYAR UANG TEBUSAN

TELAH MELAPORKAN
SPT TAHUNAN PPh TERAKHIR

amnesti pajak

SPT TAHUNAN PPh TERAKHIR

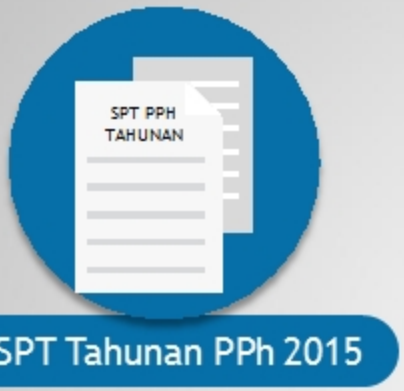

Bagi WP yang tahun bukunya berakhir pada periode 1 Juli 2015 s.d. 31 Desember 2015

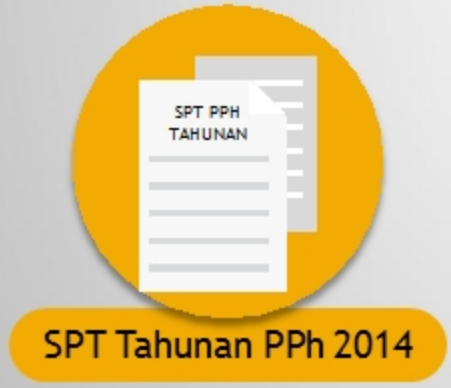

Bagi WP yang tahun bukunya berakhir pada periode 1 Januari 2015 s.d. 30 Juni 2015

PERSYARATAN

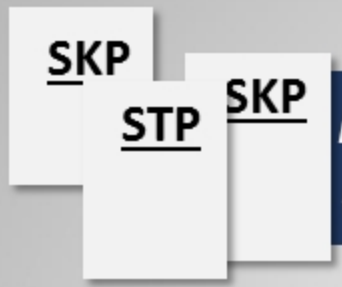

MELUNASI SELURUH POKOK TUNGGAKAN (TERMASUK CABANG)

BAGI WAJIB PAJAK YANG SEDANG DILAKUKAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN DAN/ATAU PENYIDIKAN, HARUS MELUNASI:

- PAJAK YANG TIDAK ATAU KURANG DIBAYAR
- PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK DIKEMBALIKAN

PERSYARATAN

MENCABUT PERMOHONAN

- **PENGEMBALIAN** KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
- **PENGURANGAN/PENGHAPUSAN** SANKSI ADMINISTRASI DALAM SKP DAN/ATAU STP YANG TERDAPAT POKOK PAJAK TERUTANG
- **PENGURANGAN/PEMBATALAN** KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR
- **GUGATAN, KEBERATAN, BANDING, & PK**
- **PEMBETULAN** ATAS SURAT KETETAPAN PAJAK DAN SURAT KEPUTUSAN

10 HARI KERJA

Menteri Keuangan
MENERBITKAN
Surat Keterangan
Pengampunan Pajak

amnesti
pajak

KERAHASIAAN DATA

TIDAK DAPAT diminta oleh siapa pun

TIDAK DAPAT diberikan pada pihak mana pun

TIDAK DAPAT dijadikan dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan tindak pidana apa pun

Barangsiapa **MEMBOCORKAN** informasi akan dihukum **PIDANA PENJARA** paling lama **5 TAHUN**

SAMPAIKAN SURAT PERNYATAAN HARTA UNTUK PENGAMPUNAN PAJAK BESERTA PERSYARATAN KE KPP TERDAFTAR

SEGERA!

amnesti pajak

SETELAH MASA PENGAMPUNAN BERAKHIR

WP **TIDAK** MEMANFAATKAN PENGAMPUNAN PAJAK

DAN DJP **MENEMUKAN** HARTA YANG BELUM DILAPORKAN

KONSEKUENSINYA?

KONSEKUENSI

SETELAH MASA PENGAMPUNAN BERAKHIR

MAKSIMAL **3** TAHUN

Sejak Berlakunya UU Pengampunan Pajak

Harta tersebut akan diperhitungkan sebagai **tambahan penghasilan**

+ SPT

Dan **DIKENAI PAJAK** dengan ditambah **SANKSI ADMINISTRASI sesuai UU PERPAJAKAN**

JIKA SETELAH MASA PENGAMPUNAN BERAKHIR

DJP **MENEMUKAN** HARTA YANG BELUM DILAPORKAN WP YANG **IKUT** PROGRAM PENGAMPUNAN PAJAK

Harta tersebut akan diperhitungkan sebagai **tambahan penghasilan**

SPT

Dan **DIKENAI PPh** dengan ditambah **SANKSI**

200%

amnesti pajak

Segala **SENGKETA** yang berkaitan dengan pelaksanaan **AMNESTI PAJAK** hanya dapat diselesaikan melalui pengajuan gugatan pada

BADAN PERADILAN PAJAK

TERIMA KASIH

Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak

Kring Pajak 1500200

Situs Pajak www.pajak.go.id

ungkap . tebus . lega